

Majalah Digital Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur



ASPIRASI *kita*

Edisi 15

Monthly Report

Fraksi PKS DPRD JATIM

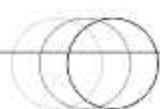
Jejak Pengabdian Fraksi PKS
DPRD Provinsi Jawa Timur

MARET 2026

   fraksipksjatim
 www.fraksipksjatim.id

Daftar Isi

Sampul Halaman	1
Daftar Isi	2
Profil Singkat Dewan	3
Ringkasan Kinerja Fraksi	4 - 14
Kiprah Dewan	15 - 36
Galeri Foto Kegiatan	37 - 44
Penutup	45





PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2029

H. AGUS CAHYONO SHI, MHI.

ANGGOTA KOMISI I DPRD
JAWA ANGGOTA FRAKSI PKS

DR. H. PUGUH WIJI PAMUNGKAS, MM

ANGGOTA KOMISI DPRD JAWA
SEKRETARIS FRAKSI PKS

HJ. LILIK HENDARWATI, S.AK

ANGGOTA KOMISI DPRD JAWA
SEKRETARIS FRAKSI PKS

DRS.H.M. KHUSNUL KHULUK

ANGGOTA KOMISI DPRD JAWA
ANGGOTA FRAKSI PKS

HARISANDI SAVARI, S.PT., S.T

ANGGOTA KOMISI DPRD JAWA
SEKRETARIS FRAKSI PKS

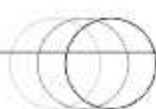
Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Maret 2026:



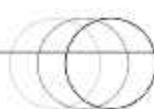
Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Senin, 09 Maret 2026

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi C resmi ditunjuk sebagai tim pembahas Raperda Penyertaan Modal. Pembasan Awal Rancangan Peraturan Daerah Terkait Penyertaan Modal



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



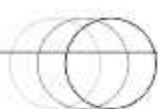
Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Maret 2026:



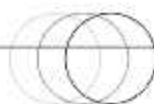
Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Senin, 30 Maret 2026

Rapat Paripurna, dengan agenda penyampaian Nota Gubernur atas LKPJ Gubernur Jawa Timur akhir tahun Anggaran 2025. Isi laporan berupa berbagai capaian pembangunan, kondisi ekonomi, hingga pelaksanaan program daerah dipaparkan dan akan menjadi bahan evaluasi DPRD terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan.



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



Recap 6 - 13 Maret 2026

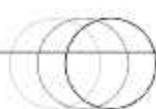
Agenda Komisi dan Badan



Badan Musyawarah terus berkomitmen mengawal pengembangan program pemberdayaan perempuan serta memperkuat upaya perlindungan anak secara berkelanjutan melalui pertemuan strategis bersama DPPA DKI Jakarta.



Komisi A menggelar forum komunikasi dengan DPRD DIY dan Dispendukcapil terkait pelaksanaan program Jaga Desa serta pemberdayaan masyarakat di kalurahan dan kelurahan.

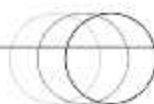




Komisi E menegaskan penguatan pembahasan Raperda Provinsi Jawa Timur tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas melalui forum strategis bersama Dispora DIY guna membahas penyelenggaraan sistem pendidikan yang ramah bagi penyandang disabilitas.



Komisi B memastikan kesiapan swasembada gula di Jawa Timur dalam upaya menunjang program ketahanan pangan nasional melalui Forum Koordinasi yang digelar di Pabrik Gula Pagotan, Madiun.

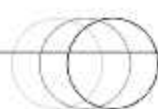




Pansus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gelar pembahasan kinerja BUMD bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan guna memperkuat pengelolaan aset dan tata kelola perusahaan daerah.



Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur memastikan kesiapan infrastruktur jalan serta mitigasi bencana hidrologi untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2026 melalui pantauan langsung di Terminal Tipe B Maospati dan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun.



Recap 20 - 27 Maret 2026

Agenda Komisi dan Badan



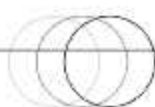
Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan forum komunikasi untuk membahas peran DPRD dalam sektor pariwisata serta pengelolaan aset museum. sebagai upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.



Pansus BUND Provinsi Jawa Timur menggelar pertemuan sinergitas



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi di DIY



FPKS DPRD JATIM: JAMKRIDA HARUS BUKTIKAN DULU KEBERPIHAKAN PADA UMKM!



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur meminta Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Jamkrida) membuktikan terlebih dahulu keberpihakannya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebelum adanya penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menanggapi agenda Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Jamkrida dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (9/3/2026).

Menurut Lilik, Fraksi PKS sebelumnya telah menyampaikan sejumlah catatan penting terkait kinerja Jamkrida, terutama mengenai arah penyaluran penjaminan kredit yang dinilai belum sepenuhnya menyasar sektor UMKM. Pandangan PKS kemarin sudah kami sampaikan bahwa Jamkrida secara bisnis masih lebih banyak membantu pinjaman multiguna dibandingkan UMKM. Padahal visi misinya jelas untuk membantu UMKM," ujar Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur itu.



Dalam pembahasan Raperda tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan penyertaan modal daerah sekitar Rp300 miliar kepada Jamkrida. Namun Fraksi PKS menilai rencana tersebut perlu disertai penjelasan yang lebih transparan terkait dasar perhitungan kebutuhan modal. Lilik menegaskan DPRD hingga saat ini belum menerima paparan rinci mengenai kajian kelayakan bisnis yang menjadi dasar pengajuan tambahan modal tersebut. “Kalau mereka menyampaikan membutuhkan Rp300 miliar, tentu harus jelas perhitungannya seperti apa.

Katanya sudah ada uji kelayakan, tapi kami belum mendapatkan data kajian tersebut,” katanya. Menurutnya, kejelasan perhitungan sangat penting agar DPRD dapat memastikan bahwa tambahan modal benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. FPKS juga menyoroti dominasi penjaminan kredit multiguna yang selama ini dinilai lebih besar dibandingkan penjaminan bagi sektor UMKM. Padahal, Jamkrida didirikan dengan tujuan utama untuk membantu pelaku usaha kecil memperoleh akses pembiayaan. “Kalau memang tujuannya untuk UMKM, maka harus tepat sasaran untuk UMKM. Jangan justru lebih banyak digunakan untuk multiguna yang sifatnya konsumtif,” tegas Lilik.

Ia menambahkan, pengalaman selama masa pandemi COVID-19 justru menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki ketahanan yang cukup baik, termasuk dalam hal kedisiplinan pembayaran kredit. “UMKM bahkan terbukti cukup disiplin dalam pembayaran kredit. Karena itu sektor ini harus benar-benar menjadi prioritas,” ujarnya. Selain menyoroti arah kebijakan bisnis Jamkrida, Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali urgensi penyertaan modal tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang diterapkan.

Lilik, sebelum memperoleh tambahan modal, Jamkrida seharusnya mampu menunjukkan kinerja yang konsisten dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. “Jamkrida harus menunjukkan dulu bahwa kinerjanya memang berpihak kepada masyarakat kecil sesuai dengan visi misinya. Setelah itu baru kita mempertimbangkan penyertaan modal,” pungkasnya.

“Jamkrida harus menunjukkan dulu bahwa kinerjanya memang berpihak kepada masyarakat kecil sesuai dengan visi misinya. Setelah itu baru kita mempertimbangkan penyertaan modal.”

Hj Lilik Hendarwati
Anggota Komisi C DPRD Jatim,
Ketua Fraksi PKS

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)





SOLOSEMIRAN DPRD JATIM, LILIK HENDARWATI TEKANKAN RELIGIUSITAS DAN NASIONALISME SEBAGAI PILAR DEMOKRASI

Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati, menggelar kegiatan Solosemiran (Sosialisasi, Lokakarya, dan Seminar) pada Sabtu (7/3/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum diskusi bersama tokoh masyarakat, ustaz, dan Komunitas Relindo Indonesia (Relindo Jatim).

Dalam sambutannya, Lilik menjelaskan bahwa Solosemiran merupakan salah satu agenda resmi anggota DPRD Jawa Timur untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat di daerah pemilihannya. "Solosemiran ini sebenarnya singkatan dari sosialisasi, lokakarya, dan seminar. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anggota dewan untuk berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat di dapil," ujar Ketua Fraksi PKS Jatim itu.

Acara yang digelar dalam suasana Ramadan tersebut juga dirangkai dengan silaturahmi dan buka puasa bersama. Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk para ustaz dan perwakilan komunitas yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam kesempatan itu, Lilik menyampaikan materi bertema "Religiusitas dan Nasionalisme sebagai Pilar Penguatan Demokrasi."

la menekankan bahwa nilai-nilai keagamaan dan kecintaan terhadap bangsa menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, religiusitas memiliki peran penting dalam membentuk integritas para pemimpin, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. "Religiusitas melahirkan kejujuran bagi seorang pemimpin. Kita tentu menginginkan pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan konsisten antara ucapan dan tindakan," jelasnya.

la menambahkan, nilai religius juga melahirkan sikap amanah dalam menjalankan jabatan. Bagi pejabat publik, amanah berarti memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi. Lilik mencontohkan salah satu fokus yang selama ini ia dorong adalah pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di Surabaya.

"Memperjuangkan UMKM memang tidak selalu populer, tetapi itu penting karena banyak masyarakat kita yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut," ujarnya. Selain religiusitas, Lilik juga menegaskan pentingnya nilai nasionalisme dalam menjaga persatuan bangsa. Menurutnya, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Nasionalisme menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.

Dengan begitu, semua kebijakan dan program pembangunan harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat," katanya. Ia juga menilai nasionalisme dapat menjadi penyejuk dalam dinamika politik. Perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus tetap diarahkan untuk tujuan bersama membangun bangsa. "Bangsa ini tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Kita harus bekerja bersama-sama dengan semangat persatuan," ujarnya.

Di akhir pemaparannya, Lilik menegaskan bahwa demokrasi yang kuat hanya dapat terwujud jika nilai religiusitas dan nasionalisme berjalan beriringan. Menurutnya, tanpa dua nilai tersebut, demokrasi berisiko kehilangan arah dan moral. "Religiusitas menjaga hati kita agar tetap lurus, sedangkan nasionalisme menjaga langkah kita agar tetap untuk negeri. Jika dua nilai ini hidup dalam diri kita, maka demokrasi Indonesia akan tetap kokoh dan bermartabat," pungkasnya. Melalui kegiatan Solosemiran tersebut, Lilik berharap masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi sekaligus menjaga nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

MALANG MES

Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa

/ Baca / Pemerintahan

POKOK BAHASA

Lilik DPRD Jatim Tekankan Religiusitas dan Nasionalisme sebagai Fondasi Demokrasi

Penulis: Muhammad Cholil Anwar - Editor: Dede Nana

09 Mar 2026



Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dari Daerah Pemilihan Surabaya Lilik Hendarwati.

JATIMTIMES — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dari Daerah Pemilihan Surabaya Lilik Hendarwati menegaskan pentingnya nilai religiusitas dan nasionalisme sebagai fondasi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

09 Mar 2026 - 22:19:11 WIB

MADIUN MES

POKOK BAHASA

Lilik DPRD Jatim Tekankan Religiusitas dan Nasionalisme sebagai Fondasi Demokrasi

Penulis: Muhammad Cholil Anwar - Editor: Dede Nana

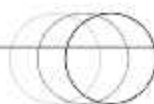
09 Mar 2026 08:11



Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dari Daerah Pemilihan Surabaya Lilik Hendarwati.

JATIMTIMES — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dari Daerah Pemilihan Surabaya Lilik Hendarwati menegaskan pentingnya nilai religiusitas dan nasionalisme sebagai fondasi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, kedua nilai tersebut harus berjalan beriringan agar praktik demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga memiliki arah moral yang jelas. Hal itu disampaikan Lilik dalam kegiatan Sosialisasi, Lokakarya, dan Seminar (Soloseminar) bersama tokoh masyarakat, ustaz, serta Komunitas Belindo Indonesia di Surabaya, belum lama ini.



SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Masih tingginya potensi curah hujan tinggi termasuk angin kencang jelang lebaran layak dijadikan antisipasi pemerintah melainkan sejumlah upaya termasuk rekayasa cuaca agar lebaran berjalan lancar terutama dimasa mudik dan balik. Ini yang diusulkan oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, yang mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Setelah mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk jajaran kepolisian dan pemerintah daerah terkait persiapan mudik lebaran, Puguh menegaskan kesiapan pengamanan mudik sudah mulai dimatangkan sejak beberapa hari lalu melalui apel kesiapsiagaan bersama di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

“Dalam rapat koordinasi itu disampaikan bahwa kita harus mengantisipasi kemungkinan curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem di sisa musim hujan ini,” kata Puguh Selasa (17/3/2026). Salah satu langkah yang disiapkan adalah program modifikasi cuaca. Program ini direncanakan berlangsung selama masa angkutan mudik dan balik Lebaran. “Rencananya modifikasi cuaca dilakukan mulai 16 Maret hingga 26 Maret. Tujuannya untuk mengurangi risiko hujan dengan intensitas tinggi,” jelasnya. Anggota DPRD Jatim Dapil Malang Raya itu menilai langkah tersebut penting. Sebab, sejumlah wilayah di Jawa Timur memiliki kondisi tanah yang sudah jenuh akibat hujan selama beberapa bulan terakhir.

Jika curah hujan kembali tinggi, potensi bencana seperti longsor dan banjir bisa terjadi. Apalagi saat banyak rumah ditinggal pemiliknya yang sedang mudik. “Jangan sampai saat rumah ditinggalkan, justru terjadi bencana seperti longsor atau banjir yang menimbulkan kerugian,” tegasnya. Puguh juga menyoroti sejumlah daerah yang perlu mendapat perhatian khusus selama musim mudik. Salah satunya jalur selatan Jawa Timur yang dikenal rawan longsor. Selain itu, beberapa wilayah yang kerap mengalami banjir juga perlu dipantau secara intensif. “Beberapa daerah yang sering banjir seperti Lamongan, Pasuruan, dan Probolinggo harus diantisipasi. Jangan sampai hujan dengan durasi lama memicu banjir saat arus mudik berlangsung,” ujarnya.

Puguh Ingatkan Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Mudik, Terutama Jalur Selatan dan Daerah Rawan Banjir



Tidak hanya itu, kawasan wisata yang diprediksi ramai pengunjung saat libur Lebaran juga perlu mendapat perhatian. Potensi bencana di lokasi wisata harus diantisipasi sejak awal. Puguh memastikan pemerintah provinsi bersama organisasi perangkat daerah telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan darurat. Koordinasi telah dilakukan dengan instansi teknis, termasuk balai jalan nasional dan dinas pekerjaan umum, untuk mempercepat penanganan jika terjadi longsor di jalur mudik. “Kalau terjadi longsor, kami sudah berkoordinasi dengan BPJN dan Dinas PU Bina Marga, baik pusat maupun daerah, agar penanganan bisa segera dilakukan,” paparnya.

Selain itu, antisipasi juga dilakukan untuk menghadapi kemungkinan tanggul jebol yang bisa memicu banjir. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan dukungan logistik jika terjadi bencana yang memicu pengungsian. “Kami sudah melakukan dropping logistik ke seluruh kabupaten dan kota. Jika terjadi pengungsian, logistik tersebut bisa langsung digunakan untuk membuka dapur umum,” terang Puguh. Ia menambahkan, dukungan juga akan datang dari relawan yang bergabung dalam berbagai posko terpadu penanganan bencana selama masa mudik Lebaran. “Relawan juga bergerak membantu posko-posko terpadu bersama pemerintah dan instansi terkait,” pungkasnya.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

KANALINDONESIA.COM Home News Daerah Ekstra Hukum Tekno Olahraga Lifestyle Opini VI

KANAL JATIM

Puguh Ingatkan Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Mudik, Terutama Jalur Selatan dan Daerah Rawan Banjir

Tribun ANAHIS - 17 Mar 2025



SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Masih tingginya potensi curah hujan tinggi termasuk angin kencang jelang lebaran layak dijadikan antisipasi pemerintah melakukan sejumlah upaya termasuk rekayasa cuaca agar lebaran berjalan lancar terutama dimasa mudik dan balik.

Ini yang diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, yang mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

MAKLUMAT.id

Beranda Topik Kilas Opini Hikmah Sosok Terkini Video Lainnya

Home > Kilas > Mudik Lebaran 2025, Puguh Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem dan Rawan Banjir-Longsor di Jatim

Mudik Lebaran 2026, Puguh Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem dan Rawan Banjir-Longsor di Jatim

17 Maret 2025 Zaki Zubadi 3 min read



Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. FOTO: dok Humas DPRD Jatim

MAKLUMAT – Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

Peringatan tersebut disampaikan Puguh setelah mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah

TIMES INDONESIA Home Kanal Foto Berita Foto

Internasional Nasional Daerah Link Fakta Sapa Teman Ekonomi Seni Pendidikan Olahraga Olahraga

Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Jalur Selatan dan Daerah Rawan Banjir Diperketat

Anggota DPRD Jatim di Puguh Wiji Pamungkas mengingatkan potensi cuaca ekstrem di Jalur Lintas Selatan (JLS) saat mudik Lebaran 2026. Simak poin pentingnya.

TIMES Indonesia, 17 Maret 2025, 17:50 WIB

Zain Shidiq Mahendra, Dewy Muzakki, Rizal Dendi



LENTERA

Home Paper Headline Trending Aktual Opini Gaya Hidup About US

Search here

Featured

DAFTAR ISI

Potensi Bencana Intai Arus Mudik, DPRD Jatim Minta Pengawasan Ketat Jalur Rawan

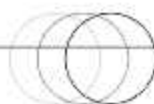
17 Maret 2025



Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas

SURABAYA (Lentera) — Potensi cuaca ekstrem selama arus mudik dan balik Lebaran menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menekankan pentingnya pemertasaan tolak di jalur tol rawan bencana, khususnya wilayah selatan dan daerah yang banyak dilanda banjir.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pihaknya mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, dalam rangka memantapkan persiapan pengembaraan mudik.



Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu sebagai bagian dari upaya efisiensi energi mendapat perhatian serius dari DPRD Jawa Timur. Ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kinerja, khususnya di lingkungan OPD dan BUMD. Menurut Lilik, langkah efisiensi energi di tengah tantangan global memang penting dan patut didukung. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan produktivitas, apalagi bagi BUMD yang selama ini menjadi sorotan publik.

"BUMD jangan menjadikan efisiensi energi sebagai alasan untuk menurunkan kinerja. Tidak bisa kemudian kinerja turun lalu dibenarkan karena ada kebijakan WFH atau krisis energi," tegasnya. Lilik menilai, sejumlah OPD di Jawa Timur sebenarnya sudah sangat siap menjalankan pola kerja fleksibel berbasis digital. Ia menyebut instansi seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memiliki sistem digital yang kuat. Menurutnya, kehadiran layanan seperti Jatim Online Single Submission (JOSS) menjadi bukti bahwa pelayanan publik tetap bisa berjalan optimal tanpa harus selalu mengandalkan kehadiran fisik di kantor. "Sekarang hampir semua sudah berbasis digital.

Pajak bisa dibayar secara online, perizinan juga sudah digital. Artinya, WFH tidak seharusnya mengganggu pelayanan maupun target kinerja," jelas legislator dari Dapil Surabaya ini. Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman saat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kinerja, khususnya penerimaan pajak daerah, tetap bisa terjaga meskipun aktivitas dilakukan secara terbatas. "Saat pandemi, interaksi fisik dibatasi, tapi penerimaan pajak tetap stabil karena masyarakat menggunakan platform digital. Jadi target pendapatan tidak boleh kendur hanya karena ada WFH," tambahnya.

Lebih jauh, Lilik menekankan bahwa semangat efisiensi energi tidak boleh berhenti pada kebijakan WFH semata. Ia menilai, penghematan energi justru bisa dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan kantor. "Sering kali kantor ditinggalkan tapi AC dan lampu masih menyala. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya bisa dihemat. Jadi efisiensi itu bukan hanya soal WFH, tapi soal budaya," ungkapnya. Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan efisiensi energi dilakukan dengan perhitungan yang matang dan terukur, bukan sekadar simbolik. "Semua kebijakan harus dihitung dampaknya secara nyata. Jangan sampai hanya terlihat bagus di konsep, tapi tidak memberikan penghematan signifikan," pungkasnya.



**WFH RABU
DITERAPKAN, LILIK
HENDARWATI
INGATKAN:
JANGAN SAMPAI
KINERJA OPD DAN
BUMD IKUT "WFH"**

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

JATIM POS .CO
JATIM POS ONLINE

EMASRI IRIWI
Dahis di Madras yang Sangat Hilang
Diamukan Menunggu di S...

OPD DAN BUMD
KEMERDEKAAN
JATIM POS ONLINE

Lilik DPRD Jatim Ingatkan OPD dan BUMD Tetap Jaga Kinerja di Tengah WFH

24 Maret 2020

Foto: Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) ASN Pemprov Jatim tidak boleh menjadi alasan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menurunkan

TERKINI

Bupati Jember Pasang Batin Di
Stuk Caji, Pasangkan Garang

JATIMTIMES

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim: Efisiensi Energi Bukan Dalih OPD dan BUMD Kendor Kinerja

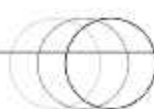
Penulis: Mubarek Choral Anwar | Editor: Sri Rama Mahkota

27-Mar-2020 10:14

Ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Lilik Hendarwati.

JATIMTIMES — Ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Lilik Hendarwati, inewanti-wanti agar kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu tidak dijadikan alasan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menurunkan produktivitas.

Lilik menegaskan, langkah efisiensi energi di tengah krisis global adalah keharusan, namun hal tersebut tidak boleh mengorbankan target kinerja, khususnya bagi BUMD yang saat ini tengah jadi sorotan publik.





390 DESA PUNYA POTENSI WISATA, PUGUH DPRD JATIM: MALANG BISA JADI KEKUATAN EKONOMI BARU

Kabupaten Malang dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru melalui pengembangan desa wisata. Potensi tersebut muncul dari banyaknya desa yang memiliki daya tarik wisata alam, budaya, hingga produk ekonomi kreatif. Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Dr. H. Puguh Pamungkas, menyebutkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, terdapat lebih dari 390 desa di Kabupaten Malang yang memiliki potensi wisata. "Jumlah ini menunjukkan bahwa Malang memiliki potensi yang luar biasa. Jika dikelola secara optimal, desa wisata bisa menjadi basis ekosistem ekonomi baru bagi daerah," ujar Puguh.

Menurutnya, pengembangan desa wisata tidak hanya berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga dapat memperkuat ekonomi masyarakat melalui berbagai sektor seperti kuliner lokal, homestay, hingga produk kreatif desa. Puguh memperkirakan jika seluruh potensi desa wisata tersebut dikelola secara maksimal, maka nilai ekonomi yang dihasilkan bisa mencapai Rp1,2 hingga Rp1,5 triliun per tahun. Nilai tersebut berasal dari berbagai aktivitas ekonomi yang terhubung dengan pariwisata, seperti tiket masuk destinasi wisata, penjualan kuliner khas, jasa penginapan berbasis homestay, hingga produk kerajinan masyarakat. "Ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin tidak mudah," katanya.

Selain itu, sektor wisata juga telah memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2025, penerimaan dari pajak hiburan sektor wisata di Kabupaten Malang tercatat mencapai Rp7,9 miliar, mendekati target Rp8,02 miliar. Meski memiliki potensi besar, Puguh menilai pengembangan desa wisata membutuhkan strategi yang terarah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia menyebutkan setidaknya ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan, mulai dari penguatan infrastruktur menuju desa wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan produk wisata yang beragam. "Malang memiliki potensi wisata alam seperti pantai, gunung, dan air terjun, juga kekayaan budaya dan kuliner khas. Semua itu bisa menjadi daya tarik wisata yang kuat jika dikelola secara serius," ujarnya.

Selain itu, pengembangan desa wisata juga perlu didukung dengan model bisnis berbasis komunitas agar masyarakat desa menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi wisata. Di sisi lain, Puguh mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Malang, seperti keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta potensi komersialisasi budaya. Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, hingga perguruan tinggi untuk memperkuat ekosistem desa wisata. "Desa wisata bukan sekadar destinasi wisata, tetapi bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Jika dikelola dengan baik, desa wisata akan mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat ekonomi daerah," pungkasnya.





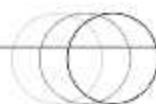
Tiang Listrik dan Reklame Roboh di Sidoarjo, Harisandi DPRD Jatim Desak Pemprov Audit Total Keamanan Infrastruktur Jalan

Ambruknya tiga tiang listrik dan satu papan reklame besar di Jalan Raya Gilang, Kecamatan Taman, Sidoarjo, pada Jumat (6/3) sore, mendapat perhatian serius dari legislator PKS Jawa Timur, Harisandi Savari. Insiden yang dipicu hujan deras dan angin kencang tersebut sempat melumpuhkan arus lalu lintas dari arah Mojokerto menuju Surabaya. Menanggapi kejadian ini, Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur ini mendesak Pemerintah Provinsi dan instansi terkait untuk segera melakukan langkah mitigasi darurat agar kejadian serupa tidak terulang, mengingat cuaca ekstrem masih mengintai wilayah Jawa Timur.

"Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Meskipun tidak ada korban jiwa, kemacetan parah yang terjadi telah merugikan mobilitas warga dan nadi ekonomi di jalur utama Surabaya-Mojokerto. Saya meminta Dinas PU Bina Marga dan PLN untuk segera menuntaskan evakuasi malam ini juga agar arus lalu lintas kembali normal," ujar Harisandi. Sebagai anggota komisi yang membidangi infrastruktur, Harisandi memberikan catatan kritis kepada mitra kerja Komisi D. Ia menekankan bahwa pemeliharaan rutin seharusnya tidak hanya menyasar pada aspal jalan, tetapi juga sarana penunjang seperti tiang penerangan dan papan reklame.

"Saya mendesak Dinas PU Bina Marga dan Dinas Perhubungan Jatim untuk segera melakukan audit kelayakan konstruksi tiang dan papan reklame di sepanjang jalur provinsi. Kita harus memastikan pondasi konstruksi tersebut masih kuat menahan beban angin kencang. Jangan menunggu jatuh korban baru bertindak," tegas Bendahara Fraksi PKS Jatim ini. Harisandi juga menyoroti aspek keselamatan pada papan reklame komersial. Ia meminta pemerintah daerah bersikap tegas terhadap pemilik reklame yang tidak memenuhi spesifikasi teknis keamanan.

"Pemerintah harus mengevaluasi izin reklame-reklame besar yang ada di bahu jalan. Jika ditemukan konstruksi yang sudah keropos atau tidak sesuai standar, segera bongkar. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan PAD dari pajak reklame," tambahnya. Menutup keterangannya, legislator asal Dapil Madura ini menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara di tengah hujan deras. "Cuaca saat ini sulit diprediksi. Kami di Komisi D akan terus mengawal agar Pemprov Jatim lebih proaktif dalam pemeliharaan infrastruktur. Kami ingin memastikan setiap warga yang melintas di jalan raya Jawa Timur merasa aman dan terlindungi," pungkas Harisandi.



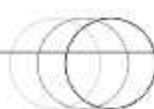
Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

The screenshot shows a news article on the RRI.CO.ID website. The main article is titled "DPRD Jatim Soroti Kerusakan Ruas Jalan jelang Arus Mudik Lebaran" and was published on 12 Mar 2026 at 20:50 WIB from Surabaya. It is written by Anik Hasanah and edited by Benny Hermawan. The article features a photograph of a meeting with several people seated around a table. A blue button labeled "Dengarkan Berita" is visible below the photo. The article text mentions that the DPRD Jatim is pushing for the relevant agency, Dinas PU Bina Marga, to take immediate action on road damage, as it is predicted to cause a surge in vehicle mobility during the 2026 Lebaran holiday.

On the right side of the page, there is a sidebar with several other regional news items, each with a "REGIONAL" tag and a date of 15 Apr 2026:

- TBC Surabaya Tinggi, Bukti Deteksi Dini Berhasil
- Bantuan Traktor Roda 4, Mudahkan Petani
- Pemkot-Polisi Perkuat Sinergi, Parkir Digital Surabaya Dipercepat
- Sidang Sengketa Ijazah Jombang Memanas, Majelis Siap Turun ke Lapangan
- Gubernur Khoffah Beberkan Strategi dan Kita Sukses Jadi Provinsi Lumbang Pangan

At the bottom right, there is a section for "BERITA TERPOPULER" (Most Popular News) with a sub-header "01" and a snippet of an article titled "Pesona Jalak Suren, Hobi Memelihara Burung Kicau yang..."





Jelang Arus Mudik Lebaran, Harisandi DPRD Jatim Minta Pengawasan Ketat di Titik Rawan Bencana Jalan Provinsi

Menjelang arus mudik dan balik Lebaran, DPRD Jawa Timur mengingatkan pentingnya pengawasan ekstra pada titik-titik rawan bencana di ruas jalan provinsi. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keselamatan masyarakat yang akan melakukan perjalanan pulang kampung maupun kembali ke kota setelah Hari Raya. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, R. Harisandi Savari, mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki peta titik rawan bencana di sejumlah ruas jalan provinsi. Namun, menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat Lebaran, data tersebut harus diikuti dengan pengawasan langsung di lapangan. "Secara data pemetaan titik rawan bencana di jalan provinsi sudah ada. Yang perlu diperkuat sekarang adalah pengawasan di lapangan, khususnya pada lokasi yang memiliki potensi longsor, banjir, maupun kerusakan badan jalan," ujar Bendahara Fraksi PKS Jatim itu.

Menurut Harisandi, pengawasan tersebut penting agar pemerintah dapat melakukan langkah antisipatif lebih awal, seperti memperkuat konstruksi jalan, memperbaiki drainase, hingga memasang rambu peringatan di titik-titik berisiko. Ia menjelaskan bahwa saat ini tingkat kemantapan jalan provinsi di Jawa Timur telah mencapai sekitar 86,5 persen, sementara sisanya sekitar 13,49 persen masih memerlukan perbaikan. Di sisi lain, titik rawan bencana seperti banjir, longsor, hingga potensi kemacetan juga tersebar di berbagai kabupaten dan kota. "Ini harus menjadi perhatian serius karena saat musim mudik mobilitas masyarakat meningkat tajam. Jangan sampai kerusakan jalan atau bencana justru membahayakan para pemudik," katanya. Karena itu, ia mendorong instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan pengawasan intensif di lokasi-lokasi yang sudah teridentifikasi rawan.

Menurutnya, langkah mitigasi yang dilakukan secara rutin akan membantu menekan potensi kerusakan jalan sekaligus mengurangi risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. "Kalau pengawasan dilakukan secara rutin, maka potensi kerusakan jalan akibat bencana bisa ditekan. Ini penting untuk menjaga keselamatan masyarakat yang melintas, terutama saat arus mudik dan balik Lebaran," jelasnya. DPRD Jawa Timur juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan infrastruktur jalan menjelang Lebaran. Infrastruktur jalan yang aman dan terawat dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi selama masa libur Hari Raya. "Yang kita dorong adalah langkah pencegahan. Jangan sampai menunggu kerusakan besar atau bahkan menimbulkan korban baru dilakukan penanganan," pungkasnya.

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

1 Mudik Aman, Harisandi DPRD Jatim Minta Titik Rawan Bencana Dijaga Ketat

Amirrad Choirul Anwar · Editor : A Yahya

11 · Mar · 2



Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Harisandi Savari.

- Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) [Harisandi Savari](#) memberikan peringatan dini kepada pemerintah provinsi untuk pengawasan ekstra pada titik-titik rawan bencana di sepanjang ruas jalan provinsi menjelang arus [mudik](#) dan balik Lebaran.

ini nilai krusial guna menjamin keselamatan jutaan masyarakat yang akan melakukan perjalanan pulang kampung agar terhindar dari risiko banjir yang kerap mengancam infrastruktur jalan saat cuaca ekstrem.

[Lang Lebaran, Pemkab Jember Percepat Perbaikan Jalan](#)



Peristiwa longsor yang terjadi di jalur nasional wilayah Kabupaten Trenggalek mengganggu akses utama masyarakat dan arus kendaraan antardaerah. Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX yang meliputi Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi, Agus Cahyono, meminta respons cepat dari Bina Marga atau Kementerian PUPR sebagai pengelola jalan nasional. Agus yang akrab disapa Agus Cah menegaskan bahwa ruas jalan terdampak merupakan aset nasional sekaligus jalur vital yang tidak memiliki alternatif memadai.

“Karena itu jalan aset nasional, harapan kita Bina Marga atau PU pusat senantiasa siap siaga untuk mengatasi longsor. Itu jalan utama dan tidak ada jalan alternatif lain yang benar-benar kondusif,” ujar legislator PKS ini. Menurut Agus, kondisi tersebut cukup krusial karena jalur itu menjadi akses penting bagi kendaraan logistik, kendaraan besar, hingga masyarakat dari luar daerah. Jalan alternatif yang tersedia dinilai kurang representatif, terutama bagi kendaraan bertonase besar. “Untuk mobil besar dan pengguna dari luar kota tentu tidak mudah melewati jalan alternatif. Maka PU harus siap siaga dan segera mengatasi longsor ketika terjadi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti titik longsor di kilometer 16 yang dinilai perlu dilakukan pengecekan menyeluruh hingga ke sumber longsor di bagian tebing atau bukit. Hal ini penting untuk mencegah potensi longsor susulan, terutama saat intensitas hujan tinggi. Selain penanganan darurat, Agus meminta dilakukan evaluasi teknis berupa pemetaan titik rawan longsor. Tebing-tebing yang berpotensi runtuh perlu dicek secara berkala, termasuk pohon-pohon yang dinilai rawan tumbang. “Tebing-tebing itu harus dicek, apakah ada potensi longsor saat hujan. Pohon yang berpotensi tumbang sebaiknya segera ditebang daripada nanti menimpa korban,” katanya.

Ia juga mendorong pemasangan rambu peringatan di titik-titik rawan serta kesiapsiagaan petugas saat hujan turun untuk memberikan informasi kepada para pengguna jalan. “Kalau memang ada titik kerawanan, harus ada peringatan. PU juga harus siaga saat hujan dan memberi informasi kepada pengguna jalan,” pungkasnya. Agus berharap penanganan cepat dan langkah antisipatif dari pemerintah pusat dapat meminimalkan risiko kecelakaan sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di jalur vital Trenggalek tersebut.



**LONGSOR
TRENGGALEK
GANGGU JALUR
VITAL, AGUS CAH
DPRD JATIM MINTA
RESPONS CEPAT
BINA MARGA**

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

Kawal Beasiswa untuk Ribuan Siswa, Puguh DPRD Jatim Sebut Investasi Kedaulatan Bangsa

TULUNGAGUNG TIMES

PEMERINTAHAN

Longsor Ganggu Jalur Nasional di Trenggalek, Agus Cah DPRD Jatim Desak Penanganan Cepat

Penulis : Muhammad Chotrul Anwar - Editor : Dede Nana



Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Agus Cahyono.

JATIMTIMES - Peristiwa [longsor](#) yang terjadi di jalur nasional wilayah Kabupaten Trenggalek mengganggu akses utama masyarakat serta arus antardaerah. Kondisi ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) [Agus Cahyono](#).

Terlebih, ruas jalan tersebut merupakan jalur vital yang selama ini menjadi penghubung mobilitas warga, termasuk kendaraan logistik dan ke-
besar dari berbagai daerah. Agus Cahyono pun meminta pemerintah pusat melalui pengelola jalan nasional segera melakukan penanganan.

Baca juga : [Diminta Administrasi Saat Darurat? KemenHAM: Itu Pelanggaran HAM](#)



Keluhan sejumlah kepala desa terkait berkurangnya anggaran pembangunan desa mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono. Ia menilai pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian lebih pada pembangunan desa melalui APBD Jawa Timur, khususnya pada tahun anggaran 2027. Agus mengatakan, dalam beberapa kesempatan bertemu kepala desa, banyak yang menyampaikan bahwa sebagian dana desa saat ini terserap untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Akibatnya, ruang fiskal desa untuk pembangunan infrastruktur menjadi semakin terbatas. "Beberapa kepala desa menyampaikan kepada saya bahwa anggaran desa cukup banyak tersedot untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Dampaknya, anggaran yang tersisa untuk pembangunan di desa menjadi sangat terbatas," ujar legislator PKS itu. Menurutnya, pemerintah desa sebenarnya tidak memiliki banyak pilihan karena dana desa merupakan bagian dari kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketika pemerintah pusat menetapkan kebijakan tertentu, maka pemerintah desa harus menyesuaikan. "Kita harus memahami bahwa dana desa itu berasal dari APBN. Ketika ada kebijakan dari pemerintah pusat, maka secara hierarki pemerintah desa tentu harus mengikuti," jelasnya. Meski demikian, Agus berharap program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. "Karena anggaran sudah dialokasikan ke sana, maka pemerintah desa juga harus maksimal dalam mengawal dan mendampingi program tersebut agar benar-benar memberikan manfaat sesuai visi dan misinya," katanya. Di sisi lain, Agus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat dukungan pembangunan desa melalui APBD, terutama pada perencanaan anggaran tahun 2027 yang saat ini mulai disiapkan.

Menurutnya, provinsi perlu hadir untuk membantu pembangunan infrastruktur desa yang mungkin tertunda karena keterbatasan dana desa. "Karena ini masih tahap awal perencanaan APBD 2027, saya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan desa, khususnya infrastruktur," ujarnya. Ia menilai perhatian tersebut wajar, mengingat sebagian pendapatan daerah juga berasal dari masyarakat desa, misalnya melalui pajak kendaraan bermotor. "Pendapatan APBD Jawa Timur juga berasal dari pajak kendaraan bermotor yang tentu dibayar oleh masyarakat, termasuk warga desa. Jadi mereka juga berhak menikmati infrastruktur yang baik di desanya," kata Agus. Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi dapat membuka ruang bantuan keuangan bagi desa untuk mendukung pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. "Proposal bantuan keuangan desa dari APBD Jawa Timur harus benar-benar direspons. Dengan begitu pembangunan di desa tetap bisa berjalan meskipun dana desa sebagian digunakan untuk program koperasi," pungkasnya.

DANA DESA TERSEDOT PROGRAM KOPERASI, AGUS CAH DPRD JATIM MINTA APBD 2027 PERKUAT PEMBANGUNAN DESA



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

beritaLima KAMIS, 16 APRIL 2026 | 07:36 WIB

Pencarian

BERANDA BERITA NASIONAL KRIMINAL POLITIK PENDIDIKAN KESEHATAN WISATA TEKNOLOGI OLARAGGA EPAPER INDEKS

ISLAMIC CORNER NTB

SURABAYA Aceh Madura Sulsel DKI Jakarta Papua Sumut NTB Sumbar Jateng Sulteng SUMSEL

Banjir KPK Gadungan Masuk Parlemen, Legislator Sahroni Ditagih Rp300 Juta Lawan Pengkhianat Konstitusi, Lahir Gerakan Kebangsaan Selamatkan

Beranda > Surabaya

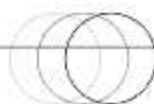
Dana Desa Tersedot Program Koperasi, Agus Cahyono Minta APBD 2027 Perkuat Pembangunan Desa

Redaksi
Sabtu, 14 Maret 2026 | 22:34 WIB | 305 views

Home Adverorial
Berita Beritalima TV
Hankam Headline
Hiburan Internasional
Kesehatan Kuliner
Olahraga Parwisata
Pendidikan Politik
Teknologi Wisata

KANAL KOTA

Bandung	Cianjur
Malang	Banyuwangi
Probolinggo	Bojonegoro
Sidoarjo	Bondowoso
Situbondo	Gresik




Menjelang Hari Raya Idulfitri, harga beras di Jawa Timur terpantau mengalami kenaikan. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena beras merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat, terutama saat permintaan meningkat selama Ramadan hingga Lebaran. Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur per 12 Maret 2026, harga rata-rata beras medium di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah mencapai Rp12.905 per kilogram. Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memperketat pengawasan harga di pasar agar tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Informasi dari Dinas Pertanian, sebenarnya stok beras di Jawa Timur masih aman. Karena itu yang perlu diperkuat adalah pengawasan harga di pasar agar tidak melebihi HET,” ujar legislator PKS itu. Ia menilai instansi terkait seperti dinas perdagangan dan perindustrian perlu melakukan pemantauan langsung di pasar-pasar untuk memastikan harga tetap terkendali. Kenaikan harga beras pada awal tahun ini dipengaruhi beberapa faktor. Selain meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan, produksi beras juga diproyeksikan mengalami penurunan pada periode Februari hingga April 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, cuaca yang tidak menentu juga berdampak pada produktivitas pertanian di sejumlah wilayah.

Meski demikian, secara umum sektor pertanian di Jawa Timur pada 2025 menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat luas panen padi mencapai 1,84 juta hektare, meningkat sekitar 13,88 persen dibandingkan tahun 2024. Peningkatan luas panen tersebut turut mendorong produksi padi yang mencapai 10,44 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2025, naik sekitar 12,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Khusnul mengingatkan agar kenaikan harga bahan pokok, khususnya beras, tidak semakin membebani masyarakat menjelang Lebaran, ketika kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat.

“Jangan sampai masyarakat terbebani menjelang Lebaran. Kasihan masyarakat karena hampir semua komoditas bahan pokok mengalami kenaikan,” katanya. Ia juga mengungkapkan bahwa di sisi petani terdapat sejumlah kendala produksi di beberapa daerah. Beberapa wilayah dilaporkan mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrem seperti hujan dan banjir, serta serangan hama. “Di beberapa daerah ada yang gagal panen karena hujan, banjir, dan berbagai macam hama. Bahkan di Jember misalnya, serangan tikus cukup merajalela,” jelasnya. Karena itu, Khusnul berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pengendalian harga di pasar, tetapi juga memberikan perhatian pada kondisi petani agar produksi pangan tetap terjaga dan stabilitas harga bisa dipertahankan.



**JELANG LEBARAN,
HARGA BERAS DI JATIM
NAIK, KHUSNUL
KHULUK DPRD JATIM
MINTA PENGAWASAN
KETAT**

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

MALANG MES

PONDOKTAWAN
Khusnul Khuluk DPRD Jatim Desak Pengawasan Ketat Harga Beras di Pasar Jelang Lebaran
Penulis: Muhammad Chelul Anwar - Editor: Yuzan Helmy



Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Khusnul Khuluk.

JATIMTIMES – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Khusnul Khuluk mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk pengawasan harga beras di pasar agar tidak melampaui harga eceran tertinggi (HET) menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Langkah pengawasan ini dinilai sangat mendesak karena beras merupakan kebutuhan pokok utama yang harganya mulai merangkak naik di lonjakan permintaan selama Ramadan hingga Lebaran. Khusnul meminta agar instansi seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan stabilitas harga bagi konsumen.

MADIUN MES

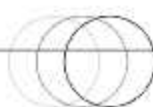
PONDOKTAWAN
Khusnul Khuluk DPRD Jatim Desak Pengawasan Ketat Harga Beras di Pasar Jelang Lebaran
Penulis: Muhammad Chelul Anwar - Editor: Yuzan Helmy



Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Khusnul Khuluk.

JATIMTIMES – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Khusnul Khuluk mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memperhatikan pengawasan harga beras di pasar agar tidak melampaui harga eceran tertinggi (HET) menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Langkah pengawasan ini dinilai sangat mendesak karena beras merupakan kebutuhan pokok utama yang harganya mulai merangkak naik di tengah lonjakan permintaan selama Ramadan hingga Lebaran. Khusnul meminta agar instansi seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan stabilitas harga bagi konsumen.



Upaya mendorong ketahanan pangan berbasis inovasi terus digencarkan oleh Khusnul Khuluk. Legislator Komisi B DPRD Jawa Timur itu menggelar sosialisasi dan pelatihan pertanian modern sekaligus meresmikan Menara Farm & Cafe di Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Minggu (29/3/2026). Kegiatan ini tidak sekadar seremoni, tetapi menjadi simbol kolaborasi antara sektor pertanian, peternakan, dan kreativitas anak muda dalam membangun ekosistem ekonomi baru di pedesaan. Menurut Khusnul, keterlibatan generasi muda dengan pendekatan teknologi modern menjadi kunci percepatan swasembada pangan nasional.

Ia menilai, transformasi sektor pertanian tidak bisa lagi mengandalkan cara konvensional. "Peran anak muda dengan sentuhan teknologi modern ini sangat penting. Dengan inovasi, produktivitas bisa meningkat dan harapan menuju swasembada pangan bisa lebih cepat terwujud," ujarnya. Ia menekankan pentingnya integrasi antara pertanian dan peternakan sebagai solusi menghadapi tantangan pangan sekaligus persoalan lingkungan. Sistem terpadu dinilai mampu mengurangi limbah sekaligus meningkatkan efisiensi produksi.

"Keterpaduan antara peternakan dan pertanian itu penting, tidak hanya untuk pangan, tapi juga menjawab persoalan limbah dan pencemaran. Ini menjadi jawaban atas tantangan zaman," jelasnya. Tak hanya fokus pada produksi, Khusnul juga mendorong penguatan aspek bisnis melalui konsep Menara Farm & Cafe. Tempat ini dirancang bukan sekadar lokasi usaha, tetapi juga ruang kolaborasi dan pertukaran ide bagi masyarakat, khususnya anak muda. Ia berharap keberadaan cafe tersebut mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang mendorong kemandirian kelompok usaha. Transparansi pengelolaan keuangan dan kerja sama antar anggota juga menjadi poin penting yang ditekankan.

"Cafe ini bukan hanya tempat nongkrong, tapi juga ruang diskusi dan pengembangan ide. Harapannya bisa menjadi sumber penghasilan dan memperkuat ekonomi anggota," tambahnya. Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Lumajang-Jember, Khusnul melihat potensi besar wilayahnya dalam pengembangan pertanian modern. Dengan dukungan pelatihan, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, ia optimistis daerah bisa menjadi salah satu penopang ketahanan pangan Jawa Timur. Langkah ini sekaligus menjadi contoh bagaimana sektor pertanian dapat dikemas lebih menarik dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan akar utamanya sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.

ANAK MUDA JADI KUNCI, KHUSNUL DPRD JATIM BANGUN EKOSISTEM PERTANIAN MODERN DI DESA LUMAJANG

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

MALANG MIES

PEMBERITUAN
Khusnul Khuluk Anggota DPRD Jatim Dorong Integrasi Pertanian-Peternakan Modern di Lumajang
Penulis: Muhammad Chaid Anwar - Editor: Sri Kusma Mahrani



Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) Khusnul Khuluk mendorong diaduknya pertanian modern di Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.

JATIMTIMES - Transformasi sektor pertanian dari metode konvensional menuju sistem modern yang terintegrasi menjadi kunci utama dalam mempercepat swasemboda pangan nasional. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) Khusnul Khuluk.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda yang dipadukan dengan sentuhan teknologi inovatif adalah jawaban konkret atas tantangan dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

JATIM MIES

PEMBERITUAN
Khusnul Khuluk Anggota DPRD Jatim Dorong Integrasi Pertanian-Peternakan Modern di Lumajang
Penulis: Muhammad Chaid Anwar - Editor: Sri Kusma Mahrani



21 Mar 2025 18:18





Galeri Foto Kegiatan



7 Maret -
Harris Gubeng Sby (SOWAN)



8 Maret -
Leedon Hotel Sby (SOWAN)



14 Maret - Perum. SDR | Damai | No. 38,
Keputih Sukolilo (Bakti Sosial)



14 Maret - Hotel Morazen (SOWAN)



14 Maret - Santunan Anak Yatim



15 Maret - Surabaya Suites Hotel (SOWAN) 11 Feb 2026



16 Maret - Timur Mushola Nurul Iman Terminal Purabaya (Launching Posko Mudik)



17 Maret - Kantor Tribun (Jl. Raya Kendangsari No.63, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo) (Podcast)



18 Maret - Medokan Ayu



**28 Maret - Harris Gubeng
(SOWAN)**



**29 Maret - Harris Morazen
(SOWAN)**



Mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan aset wisata lokal.

Grand Kanjuruhan Hotel, Jl. Panglima Sudirman No. 05, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
07 Maret 2026
125 Peserta



Mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan aset wisata lokal.

Gedung Balai Desa, Desa Parangargo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang
08 Maret 2026
125 Peserta



Mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan aset wisata lokal.

Gedung Aula SDIT Robbani, Jl. Watu Gede, Krajan Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
09 Maret 2026
125 Peserta



Mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan aset wisata lokal.

Gedung Pertemuan Desa Wringinsongo, Jl. Glanggang Raya, Sumberingin, Desa Wringinsongo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
11 Maret 2026
125 Peserta





Galeri Foto Kegiatan



Memberikan pemahaman mengenai pentingnya mencetak generasi yang unggul dan berkarakter, namun tetap memiliki daya saing di tingkat global.

Grand Kanjuruhan Hotel, Jl. Panglima Sudirman No. 05, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
14 Maret 2026
125 Peserta



Memberikan pemahaman mengenai pentingnya mencetak generasi yang unggul dan berkarakter, namun tetap memiliki daya saing di tingkat global.

Aula SMK PGRI Turen, Jl. Salak No. 01, Desa Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang
15 Maret 2026
125 Peserta



Galeri Foto Kegiatan



Memberikan pemahaman mengenai pentingnya mencetak generasi yang unggul dan berkarakter, namun tetap memiliki daya saing di tingkat global.

Gedung Pertemuan Petik Madu, Jl. DR. Wahidin No. 08, Krajan, Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang
16 Maret 2026
125 Peserta



Memberikan pemahaman mengenai pentingnya mencetak generasi yang unggul dan berkarakter, namun tetap memiliki daya saing di tingkat global.

Jl. Raya Kidangbang No. 02, RT 016 / RW 05, Dusun Jaten, Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang
17 Maret 2026
125 Peserta



Galeri Foto Kegiatan



Kegiatan Solowsemiran yang dikemas dengan acara Sosialisasi sekaligus Santunan Anak Yatim guna memberikan pembelajaran pentingnya berbagi antar sesama manusia khususnya di bulan suci Ramadhan.

Hotel ODAITA Pamekasan
15 Maret 2026
Kurang lebih 150 Orang



kompilasi aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat di daerah pemilihan (dapil)

Dongko, Kab. Trenggalek
Maret 2026
125 peserta



fokus menuju preventif (pencegahan), pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat

Ngadisuko, Kab. Trenggalek
Maret 2026
125 peserta



fokus menuju preventif (pencegahan), pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat

Sambirejo, Kab. Trenggalek
Maret 2026
Kader TPK (Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Malang)

FRAKSI PKS PROVINSI DPRD JAWA TIMUR



www.fraksipksjatim.id



fraksipksjatim